Oetoesan - Hindia:

Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 3 No 2 Tahun 2021 Hlmn. 56 - 71

Artikel Masuk : 25 Juni 2020 | Artikel Diterima : 31 Desember 2021

Akuntansi Sektor Publik Dalam Potret Khazanah Budaya Melayu

Bobby Briando¹, Muhamad Ali Embi², Sohirin³

¹²³ Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia, 06010

¹bobby_briando@gsgsg.uum.edu.my, ²ali@uum.edu.my, ³sohirin@gsgsg.uum.edu.my

¹surel korespondensi : bobby_briando@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini merupakan bentuk kritik atas pengadopsian standar akuntansi sektor publik yang berkiblat IFRS. Pengadopsian secara paripurna oleh dewan standar akuntansi terkait standar akuntansi sektor publik sesungguhnya tidak sesuai dengan semangat dan jatidiri bangsa Indonesia, khususnya budaya Melayu. Tulisan ini bertujuan untuk membentuk kesadaran akan khasanah budaya Melayu yang sangat kental dengan nilai-nilai ketuhanan dan berkearifan lokal. Hasil menunjukkan jika pengadopsian secara paripurna terkait standar akuntansi sektor publik tidak sesuai dengan spirit dan khasanah budaya melayu.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Sektor Publik, Budaya Melayu

Abstract

This article is a form of criticism of IFRS-oriented public sector accounting standards. The adoption by the accounting standards board related to public accounting standards is not in accordance with the spirit and identity of the Indonesian people, especially Malay culture. This paper is to create awareness of the treasures of Malay culture which is very thick with divine values and local wisdom. The results show that the adoption of plenary standards related to public accounting standards is not in accordance with the spirit and repertoire of Malay culture.

Keywords : Local Wisdom, Public Sector, Malay Culture

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Inilah Gurindam Pasal yang pertama:

*Barang siapa tiada memegang agama,
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.*

*Barang siapa mengenal yang empat,
maka ia itulah orang yang ma'rifat.*

*Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.*

*Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.*

*Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang terpedaya.*

*Barang siapa mengenal akhirat
Tahulah ia dunia mudarat.*

Pasal pertama dari gurindam dua belas gubahan Raja Ali Haji di atas jika dipahami dan dihayati secara mendalam sesungguhnya memiliki suatu nilai spiritual yang tinggi. Bait pertama yang berbunyi: “barang siapa tiada memegang agama maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama”. Agama merupakan pondasi dalam bermuamalah. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Keseluruhan aspek tersebut merupakan jalinan berkelindan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya, dan muara dari kesemuanya itu adalah agama (Islam). Pada akhir bait gurindam berbunyi “barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat”. Inilah sejatinya kampung terakhir yang akan dituju. Syair gurindam tersebut seolah mengingatkan kepada kita jika manusia hidup harus paham dan kenal agamanya agar tidak tersesat untuk dapat kembali ke kampung akhirat yang mana dunia hanya merupakan persinggahan sementara yang penuh dengan kemudharatan.

Fenomena yang terjadi belakangan ini justru berkebalikan dengan pesan yang disampaikan oleh Raja Ali Haji melalui syair gurindamnya. Agama seolah bukan menjadi hal yang fundamental dalam bermuamalah. Sehingga tidak jarang segala regulasi atau kebijakan acapkali memisahkan antara agama dengan muamalah. Maka tidak mengherankan jika banyak regulasi atau standar yang dibuat bersifat sekuler dan sekedar adopsi semata termasuk regulasi yang dibuat untuk menyusun standar akuntansi di sektor publik. Pengadopsian akuntansi dan sistem pendidikan saat ini telah terlepas dari realitas masyarakat

Indonesia yang notabene merupakan masyarakat yang beragama dan berbudaya.

Sistem dan konsep pendidikan akuntansi saat ini kecenderungan berasal langsung dari Barat tanpa kodifikasi dan penyesuaian yang signifikan. Akuntansi yang dibawa oleh barat pada dasarnya membawa *values* “sekularisasi” yang memiliki ciri utama *self interest*, menekankan *bootom line* laba, hanya mengakui realitas kuantitatif, materialistis dan mekanistik (Mulawarman, 2010). Konsekuensi nilai sekuler tersebut berdampak pada desain akuntansi dan mereduksi nilai di luar ekonomi. Kondisi yang berlangsung lama ini kemudian menjadi “dogma” akuntansi yang “universal” dan terstruktur dalam ekonomi positivistik. Hal ini kemudian merambah pada standarisasi akuntansi sektor publik di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis terpantik untuk mengkaji terkait standarisasi akuntansi sektor publik melalui kacamata budaya melayu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *counter* dari konsep akuntansi yang berasal dari barat yang membawa misi hegemoni dan mengarah pada evolusi sebagai “alat” neoliberalisme. Ini tentu saja kontradiktif dengan konsep budaya melayu yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan bersebatu dengan konsep ajaran Islam. Dalam budaya Melayu prinsip “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” sangat dijunjung tinggi. Hal ini memberikan suatu konsekuensi logis bahwasannya segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan sampai saling bertentangan. Apakah standarisasi akuntansi sektor publik telah sesuai dengan prinsip budaya Melayu? Inilah kemudian yang akan dibahas dalam kajian ini.

METODE

Penulisan kajian ini menggunakan sudut pandang Budaya Melayu. Untuk mengkaji alam pikiran Orang Melayu, perlu bertolak dari sudut pandang hidupnya. Dengan mengkaji pandangan hidup itu kiranya tergambar ciri-ciri alam pikiran mereka (Suwardi, 1991). Bagi Orang Melayu, Islam adalah ajaran yang menjadi panutan. Hal ini memberikan pengertian bahwa norma-norma sosial, serta seluruh aktivitas Orang Melayu wajib merujuk pada nilai-nilai Islam, inilah kemudian yang menjadi manifestasi prinsip hidup “*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”.

Artinya, adat kebiasaan yang dilakukan oleh Melayu selalu bersandarkan pada hukum Islam yang terdapat dalam kitab suci yang diwahyukan Allah SWT. Dalam budaya Melayu, Islam menjadi “tulang punggung” dalam mengembangkan nilai-nilai kehidupan “*way of life*” sehingga dalam jati diri orang Melayu terwujud *lifestyle* yang Islami. Salah satu manifestasi pikiran Orang Melayu berupa tradisi lisan dan

tulisan seperti pantun dan gurindam. Melalui tradisi inilah kemudian filosofi hidup Orang Melayu dapat tergambarkan. Filosofi gurindam yang terdiri dari dua belas pasal, satu persatu “mendedah” relung-relung hirarki kehidupan secara esensial.

Diawali dengan pasal pertama yang sangat prinsipil *“Barang Siapa Tiada Memegang Agama, Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama”*. ‘Gurindam Duabelas’ mencoba membuka kalam sekaligus tabir ketertutupan mata hati manusia dalam memandang dan menyikapi realitas kesemestaan untuk selanjutnya secara tematik merambah keranah kehidupan yang urgensitasnya menopang dan saling menyempurnakan. Dan pada akhirnya, awal dari sebuah perjalanan dan pencarian akan berhenti pada suatu titik dimana tidak ada lagi jalan lain, kecuali menghadapi kenyataan bahwa dalam kesemestaan keniscayaan hidup bersamaan pula dengan kemestian kematian. *“Ingat dirinya mati, Inilah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata, Kepada hati yang tidak buta”*. Filosofi ini tentu saja berkontradiksi dengan filosofi *self interest* yang dibawa oleh budaya barat yang termanifestasi dalam pengadopsian paripurna dalam penyusunan standar akuntansi sektor publik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historiografi Akuntansi Sektor Publik. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan awal ditandainya semangat dalam reformasi sektor publik khususnya pemerintah daerah di Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh kedua UU tersebut adalah penegasan tentang pentingnya desentralisasi. Desentralisasi dianggap sebagai the *superiority solution* yang mampu mengatasi berbagai persoalan ketimpangan kondisi serta ketidak merataan pembangunan di Indonesia. Harapan Desentralisasi dalam UU tersebut merupakan upaya peningkatan demokrasi dan kinerja daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna menuju masyarakat yang sejahtera (Tresnawati & Setiawan, 2013) .

Djamhuri (2014) menyatakan bahwa semangat desentralisasi sejalan dan menjadi agenda yang tidak dapat terpisahkan dengan Konsep *New Public Management* (NPM). Merujuk kepada pendapat Osborne (2006) ada tujuh doktrin yang menjadi semangat NPM, Kamayanti (2011) menterjemahkannya sebagai berikut: (1) berfokus pada manajemen yang entrepreneuritas dibandingkan manajemen publik administrasi yang birokratis; (2) memiliki standar eksplisit tentang kinerja; (3) memiliki penekanan pada pengendalian keluaran; (4) mementingkan disagregasi dan desentralisasi pada pelayanan publik; (5) bergeser menuju semangat kompetisi; (6) menggunakan gaya

manajemen sektor privat; dan (7) memiliki kedisiplinan dan kesederhanaan dalam alokasi sumber daya.

Dari doktrin yang diterjemahkan diatas jelas bahwa desentralisasi, pengukuran kinerja yang terukur, dan segala yang dipraktekkan di sektor privat menjadi hal yang harus dilakukan dalam penerapan NPM, selain itu dengan adanya penekanan pada pengendalian pengeluaran menjadikan informasi keuangan menjadi hal yang penting. Akuntansi memegang peran sebagai pemberi informasi yang bermanfaat bagi penggunaanya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola keuangan di sektor publik mendapat peran penting dalam reformasi pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya yang menjadi prioritas utama adalah dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam wadah PP.No. 71 Tahun 2010 yang mendasarkan pada basis akrual, sebagaimana tercantum pada paragraph 8 yang berbunyi:

“SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.”

Hal ini merupakan refleksi dari reformasi keuangan yang berkaitan erat dengan NPM seperti yang dijelaskan D. Osborne & Gaebler (1996) yaitu:

“Traditional cash accounting and control over inputs is therefore not suitable anymore. Cash accounting merely focuses on the budget and on legal compliance, rather than on managing resources effectively and efficiently ... NPM promotes the use of accrual accounting, which provides information on assets and liabilities ... ”

Sedangkan NPM sendiri memiliki enam dimensi yang dikatakan oleh Hyndman & Connolly (2011) yaitu : privatisasi, marketization, desentralisasi, orientasi hasil, sistem kualitas dan intensitas implementasi, maka sebenarnya sektor publik telah kehilangan ruhnya sebagai pelayan publik saat NPM diangkat sebagai gaya menajemennya (Kamayanti, 2011).

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, desentralisasi pada akhirnya akan berkaitan dengan jiwa kompetisi dan *interest oriented*. Hal ini diperkuat pula oleh *statement* Sarker & Sarker (2009) bahwa sistem administrasi termasuk didalamnya standar penyusunan laporan keuangan harus berorientasi pada pasar (*market*) dan kompetisi sebagai amanat Bank Dunia (*World Bank*) berikut:

“... redefining the frontiers of the public sector (expanding the scope of operations for the private sector and non-governmental

organization); enhancing the level and nature of accountability and responsiveness; streamlining regulations, laws and process, and overhauling the rules and processes and maintaining an efficient, committed and professional public service.”

Hal ini yang memunculkan sekularisasi akuntansi sektor publik. Menurut Al-Attas (2005) sekularisasi merupakan hilangnya dunia dari pemahaman religi dan kuasi religi itu sendiri, hilangnya semua yang berkenaan terkait pandangan dunia yang khas, menghancurkan semua simbol-simbol mitos supranatural. Sekularisme menurut Al-Attas (1980) memiliki tiga komponen integral, yaitu *the dischantment of nature* (penegasian terhadap kekuatan di luar manusia), *the desacralization of politics* (penegasian atas kekuasaan lokal) dan *the deconsecration of values* (penegasian nilai-nilai non materi dan penolakan terhadap *certainty condition*). Tiga bentuk sekularisasi tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep NPM yang berorientasi pasar dan menjadi dasar dalam praktik akuntansi sektor publik (Mulawarman, 2009a).

Sekularisasi bangunan teori dan realitas akuntansi sektor publik dijelaskan sebagai berikut: Pertama, *the disenchantment of nature* ditunjukkan pada substansi *self interest* yang merupakan manifestasi dari semangat privatisasi. Selanjutnya *standard setter* yang di usung *World Bank* yang berorientasi pasar dan kompetisi. Hal ini merupakan penerapan konsep dasar teoritis akuntansi, yaitu *Entity Theory*, seperti kita tahu bahwa *entity theory* merupakan dasar dari seluruh kerangka konseptual akuntansi yang kemudian mendesain seluruh logika akuntansi yang berpusat pada *stockholders*. Kedua, *the desacralization of politics* ditunjukkan pada pemisahan kekuasaan *standard setter* dari lingkaran kepentingan birokrasi dan politisi maupun pemisahan kekuasaan layaknya *principal* dan *agent*. Pemisaham kekuasaan ini menurut Fukuyama (2013) sebagai bentuk dasar kapitalisme yang merepresentasikan “tuan” dan “budak”. Representasi ini dapat dilihat dari *marketization* yang dilakukan NPM. Ketiga, *the deconsecration of values* tampak pada ditolaknya nilai-nilai normatif sebagai *main guidance*. Semangat NPM dan *market oriented* sektor publik jelas menegaskan norma-norma kearifan lokal (Mulawarman, 2009b).

Neoliberalisme Akuntansi Melalui Harmonisasi Akuntansi.

Neoliberalisme tentu sangat bertentangan dengan apa yang dicita-citakan oleh the *founding father*. Ekonomi Indonesia beserta segala regulasi dan aturannya harus disesuaikan dengan kondisi bangsa dan tujuan mulia dari Pancasila dan UUD 1945 yang mana segala sesuatu harus mengutamakan kepentingan rakyat. Negara ini harus bisa berdikari dalam ekonomi, masih terdengar teriakan Bung Karno yang menolak segala bantuan asing dengan kata-kata lantang “*Go To Hell With Your Aid*”. Negara ini tidak boleh terbelenggu oleh bentuk

penjajahan baru yang mengikat dengan segala hutang dan bantuannya. Bentuk penjajahan baru yang semakin gencar di lakukan oleh para kapitalis adalah *economic invasion*. Secara spesifik Hofman, Kadjatmiko, Kaiser, & Sjahrir (2006) menyatakan bahwa pengaturan pengelolaan pendapatan daerah di Indonesia secara tidak langsung diatur oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan *International Monetary Fund* (IMF) : Artinya ada bentuk “penjajahan” institusi-institusi asing yang campur tangan di atas kekuasaan pemerintah Indonesia.

Hal ini juga terlihat dari Sistem Akuntansi Sektor Publik (SAP) dalam menentukan bagaimana informasi keuangan dan statistik disusun dan disajikan. Menurut Athurokala dan Reid, (2003) terdapat 3 (tiga) sistem internasional yang utama namun sedikit berbeda dalam tujuannya, sebagai berikut:

- a. *European Union* (EU), *International Monetary Fund* (IMF), OECD, *United Nation* (UN) dan *World Bank* bergabung bersama mengeluarkan *System of National Accounts* (SNA). SNA mengompilasi gabungan terkait statistik keuangan agregat untuk ekonomi keseluruhan; aktivitas pemerintah dan sektor privat.
- b. IMF *Government Finance Statistics* (GFS) adalah sebuah sistem yang مخصوص untuk mendukung analisis sektor publik. GFS dirancang oleh IMF agar informasi keuangan pemerintah dapat dikomparasikan secara lintas ekonomi.
- c. *International Federations Accountant* (IFAC) menerbitkan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) mulai tahun 2000. IPSAS dirancang untuk digunakan dalam pelaporan keuangan yang bertujuan umum (*general purpose*) oleh entitas sektor publik (baik laporan individual entitas maupun laporan konsolidasian).

SNA, GFS dan IPSAS telah dikembangkan, atau diperbaiki secara radikal dalam satu dekade yang lalu, semuanya sekarang berbasis akrual. Dan digunakan untuk penyeragaman regulasi akuntansi pemerintahan yang berlaku secara global. Inilah kemudian yang disebut sebagai harmonisasi akuntansi. Ini sesungguhnya merupakan bagian dari neoliberalisme akuntansi untuk melanggengkan kepentingan hegemoni korporasi melalui *manufactured consent* untuk kepentingan MNC's di Amerika Serikat (Hamidah, Triyuwono, Sukoharsono, & Djamhuri, 2015). *Manufactured consent* adalah cara paling efektif mengarahkan kekuasaan dan justifikasi ideologis melalui deregulasi untuk mendistribusikan *wealth* dan *security* secara global pada kondisi penguatan pasar yang bebas dari intervensi regulasi (Mantzari & Georgiou, 2019).

Teknisnya, MNC's mendesain deregulasi lewat harmonisasi akuntansi, sedangkan akuntan dan analis finansial dijadikan sebagai

“professional gatekeeper” untuk injeksi kepentingan MNC’s lewat lobi politik dan kelonggaran deregulasi audit demi profit. Langkah berikutnya, “hegemoni” dan pengendalian para MNC’s di Amerika Serikat diselaraskan dengan *System of National Accountancy* (SNA) yang akan mensetir segala aktivitas Sektor Publik dengan dalih *National Economy* melalui *International Federations Accountant* (IFAC) untuk menerbitkan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)

Gambar 1 : Ruang Lingkup Sistem Akuntansi/Statistik
(*Coverage of Accounting/Statistical Systems*)

Sumber : Athukorala and Reid (2003)

Ironisnya di Indonesia sendiri Ikatan Akuntan Indonesia telah memutuskan untuk mengikuti IPSAS (*International Public Sector Accounting Standar*) yang mengacu pada IFRS dalam mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sebagaimana diketahui IFRS tersebut dalam perspektif kritis dipandang sebagai alat Imprelialisme. Lu & Abeysekera (2014) menyatakan bahwa pengadopsian tersebut dilakukan untuk mengaburkan batasan teritorial Negara melalui deregulasi. Bahkan menurut Abeysekera (2013) IFRS sangat memihak pada investor dibandingkan pemangku kepentingan lain termasuk masyarakat didalamnya. Semangat menumpuk kekayaan dalam bentuk akumulasi modal merupakan cerminan dari jiwa kapitalisme itu sendiri.

Jika ditarik ke garis awal, akuntansi sendiri sebenarnya memiliki sifat kapitalis dan mendukung kapitalisme (Kamayanti, 2011). Dalam kajian sektor publik, Kamayanti (2011) menjelaskan bahwa penggunaan standar akuntansi pemerintahan semacam itu dipengaruhi oleh kapitalisme global untuk membuka jalan bagi Perusahaan Lintas Negara (MNC’s). Ia menjelaskan lebih lanjut *“capitalism needs the state and the state is not dependent from capital”* jika melihat dari gambar 1 diatas benarlah apa yang dikatakan (Farazmand, 2010). Artinya kekuasaan yang menjadi *main core* terhadap Negara adalah (*State Enterprise*) dalam hal ini pasar dalam bentuk Perusahaan lintas Negara (MNC’s); dan

tidak hanya itu, Negara dalam hal ini pemerintah (*Public Sector*) dibutuhkan untuk melanggengkan kapitalisme (*National Economy*) (Farazmand, 2009).

Pandangan hidup dan alam pikiran Orang Melayu, mengingat Orang Melayu identik dengan penganut agama islam, maka pandangan hidup secara islami lebih banyak diuraikan. Dengan demikian alam pikiran tidak terlepas dari sudut pandang islam (Briando & Embi, 2019). Manusia sebagai makhluk berkewajiban mengabdikan kepadaNya. “*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*”. (QS. Ads Dzaarujaat:56). Selanjutnya dikatakan pula bahwa “Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berbentuk sebaik-baiknya”. (QS. Attin:4).

Kembali kepermasalahan lingkup Sistem Akuntansi Sektor Publik (SAP) aktual yang berkiblat ke IFRS dengan segala “firman” dan “ayat-ayatnya”. Yang pada akhirnya bermuara pada sistem kapitalis yang disebut *National Economy* oleh umat IFAC semakin mempertegas pernyataan Watts & Zimmerman (2006) bahwa laporan keuangan organisasi, baik sektor publik atau privat secara empiris sangat dipengaruhi oleh kepentingan pasar dan politik. Realitas harus selalu beradaptasi dengan keadaan sekitarnya, tidak konstan, sebagai hasil interaksi antara keinginan dan egoisme pribadi (*self-interest*) yang rasional. Interaksi tersebut selalu berbentuk hubungan dalam hal ini hubungan agensi terhadap *market process* maupun *political process* (Mulawarman, 2016)

“Manusia” (Alip Insan) yaitu makhluk yang dijadikan Allah SWT dari pada tidak ada kepada ada, sehingga wajarkah jika kita menyombongkan diri bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan harus dipisahkan dari Tuhan yang telah menciptakan hambanya dari stetes air mani yang hina? Masih sanggupkah kita untuk mengatakan bahwa segala bentuk regulasi dan peraturan yang dibuat oleh Alip Insan ini harus bebas dari nilai, terlebih dari nilai spiritual dan iman termasuk dalam menentukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan segala bentuk turunan peraturannya. Bagaimana alternatif lain yang sebaiknya dilakukan oleh para pengambil kebijakan terhadap masalah ini? Sebaiknya para pengambil kebijakan mengembalikan jati diri bangsa ini kembali ke fitrah-nya. Indonesia yang berlandaskan azaz kekeluargaan dan kegotong royongan dikembalikan ke habitat asalnya, unsur-unsur ketuhanan, kerakyatan dan kebersamaan yang selama ini hilang sebaiknya di *re-design* dan dikembalikan ke khitahnya.

Kembalikan falsafah dan dasar Negara se-utuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, buat regulasi dan standar yang dekat dengan-Nya, perdalam pemaknaan Pancasila khususnya sila Pertama, Hayati dan selami apa yang menjadi Hijrah para *the Founding Father*. Unsur

Spiritualitas jangan di anak tirikan, Spiritualitas sendiri didefinisikan sebagai arti dan tujuan terbesar dalam hidup seseorang (Bleidorn et al., 2015) dan dijadikan sebagai *main core* dalam memulai sesuatu, jika segala sesuatu diawali dengan niat yang baik semata karena Allah, Insha Allah segalanya akan berjalan dengan baik dan mendapat ridho-Nya (Yusdita, 2019). Moberg (2010) menjelaskan bahwa spiritualitas adalah pemahaman atas makna dan tujuan yang merupakan ekspresi spiritualitas dimanapun kita berada untuk mencapai tingkat keunggulan dan ketentraman bathin. Hal ini akan menjadikan manusia pada jaring kuasa Illahi dan menjadikan manusia sadar akan amanahnya sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) dan *Abdullah* (hamba Allah) yang suatu saat kelak akan dimintai segala pertanggungjawabannya (Mulawarman, 2019; Triyuwono, 2016).

Pemaknaan konsep mufakat dalam Budaya Melayu, sebagaimana kita ketahui bahwa Melayu identik dengan kehidupan sosialnya, lebih mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan dalam kesehariannya. Hal ini tercermin pada salah satu pasal dari Gurindam 12 yaitu :

Pasal Keduabelas

Raja bermufakat dengan menteri,

seperti kebun berpagar duri;

Betul hati kepada raja,

tanda jadi sembarang kerja;

Hukum adil kepada rakyat,

tanda raja beroleh inayat;

----- (Sejarah Riau, 1997)

Mufakat adalah kata kunci dalam menentukan langkah yang akan diambil kedepannya, hal ini bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh para penyusun Standar Akuntansi di Indonesia, yang mana dalam membuat suatu regulasi tidak jarang hanya mengadopsi langsung dari sumber nya dalam hal ini IFRS, yang biasa di analogikan dengan sebutan adopsi “paripurna”, tanpa disaring sama sekali hanya di *translate* dan di *paste* dari naskah aslinya plus tanda baca titik dan komanya. Padahal belum tentu segala sesuatu yang diadopsi dari lingkungan luar Indonesia sudah pasti *match* dan *relevance* dalam pelaksanaannya.

Efferin & Rudiawarni (2014) menyatakan bahwa Adopsi IFRS merupakan suatu bentuk regulasi yang tentunya terkait dengan beberapa kepentingan. Kepentingan tersebut terkait dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna, atas pembentukan dari suatu regulasi. Apakah kita akan menerima begitu saja konsekuensi dari penerapan itu, pasrah terhadap apa yang akan menjadi dampaknya nanti? Selalu terjajah dan terhegemoni oleh asing serta tidak dapat berdiri di atas kaki sendiri, berdiri di atas bumi pertiwi. Bagaimana hal ini dilihat dari adat istiadat budaya melayu.

Syair Lama

Tingkat Satu Setengah tingkat,

Bungkalnya Satu setengah,

Digulung ia singkat,

Direntang ia panjang.

Ungkapan ini sejajar dengan ungkapan “*Digulung sebesar kuku, dibentang selebar alam*”. Maknanya bahwa peraturan itu tidaklah kaku tetapi selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. Dengan kata lain: Hukum mengandung makna tersirat, filosofi yang dapat dikembangkan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia”.

Begitu banyaknya referensi yang diadopsi dan dijadikan rujukan dari luar Indonesia, bisa ditebak untuk siapa, pesanan siapa atau siapa yang berkepentingan sebenarnya, apakah rakyat? Jikalau rakyat kenapa pendekatannya tidak menyentuh rakyat sama sekali, dimana letak kearifan lokal kalau acuan referensinya masih berkiblat IPSAS, IFA, IASC, IASB, IMF, FASB dsb. Ternyata Indonesia melalui organisasi profesi IAI beserta dewan standarnya telah memutuskan ikut arus utama IFRS (Wahyuni, 2013). Hal ini memang sangat disayangkan, mengingat penetapan suatu standar akan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan sebuah Negara dan pemerintahan yang pada akhirnya akan bermuara kepada masyarakat.

Apakah itu yang rakyat inginkan? Rakyat hanya butuh menjalankan roda ekonominya dengan mandiri, rakyat sudah muak dengan aturan-aturan yang merugikan ekonominya, kemerdekaan rakyat dalam menjual hasil produksinya sudah terjajah oleh para toke, cukong dan tengkulak yang memiliki modal besar sehingga mereka bisa dengan seenaknya menetapkan harga dan menekan pasar. Hal ini diakibatkan oleh aturan yang menekankan kepentingan pemilik modal dan berorientasi laba yang bersandar pada paham kapitalisme yang dijalankan oleh asing. Sudah saatnya kita berdikari, berdiri diatas kaki sendiri di bawah naungan Ibu Pertiwi.

Ada suatu Puisi Kontemporer Modern yang ditulis oleh tokoh perempuan Melayu Indonesia, yang merasa gundah melihat Indonesia yang sudah semakin kebarat-baratan dalam kesehariannya, bahkan dalam pemberian nama pun sudah terkontaminasi westernisasi dan globalisasi, beliau adalah Suyatati A Manan, seorang “Cut Nyak Dien” modern dimasanya, yang berjuang untuk menanamkan nilai dan falsafah budaya melayu dalam memimpin masyarakatnya melawan arus asing, beliau pernah menjabat sebagai Walikota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau selama dua periode kepemimpinan, berikut puisi yang ditulis beliau :

MELAYUKAH AKU ?

Ape tande orang melayu
Tunjuk ajarinya menjadi penentu
Kepada orang tue hendaklah hormat
Supaye hidup menjadi selamat
Bahasanya santun
Lembut di telinge
Menyape dengan sebutan
Pok long, pak ngah dan pak busu
Itulah sebutan sayang orang melayu
Pak cik, mak cik, emak, bapak, tok, nek, piot dan oneng
Juga panggilan melayu
Atang, awang, amat, daud, dolah, siti, tinah, salmah dan zaenab
Ini juge nama khas melayu
Sayang, sebutan dan panggilan itu
Sudah terkikis erosi globalisasi
Sehingga berganti menjadi
Uncle, auntie, mami dan papi
Tinah menjadi tince
Siti menjadi serly
Dolah menjadi delon
Daud menjadi david
Atan menjadi antoni
Kalau berade di tengah kote
Malu memakai bahasa ibunde
Semue nak mengaku orang kote
Tak ade yang nak jadi orang kampung
Tapi saat pemilihan kepala daerah
Semue berlombe-lombe mengaku anak asli daerah
Akulah si dolah itu, anak pak busu yang lahir di hari minggu
Sebetulnya tak susah membuktikan die melayu
Tak perlu test urine ataupun dna
Cukup tanyekan saje pertanyaan ini, "oi nak kemane tu,"
Tak ade jawabnya
Sedang ape? Tak ade, itu juga jawabnya
Ini sudah pasti melayu asli

Itulah kerisauan yang beliau rasakan, kita hanya mengaku Melayu jika ada kepentingan, saat akan pemilihan kepala daerah misalnya, begitupun juga jika masuk musim pemilihan. Banyak yang menyatakan saya Pancasila dan saya cinta NKRI, tapi setelah menduduki kekuasaan,

praktik neoliberalisme dan kolonialisme acapkali dilakukan tanpa melihat kepentingan rakyat.

Raja Ali Haji sebagai tokoh kebudayaan Melayu pernah mengatakan bahwa masuknya kebudayaan Barat termasuk IFRS dan nilai-nilai non Islam / Liberal menimbulkan masalah modernisasi dan tantangan bagi masyarakat Melayu. Ia yakin bahwa perubahan terhadap adat-istiadat tradisional / kearifan lokal akan berakibat kerusakan masyarakat (Andaya & Matheson, 1983) Benarlah apa yang menjadi ramalan Raja Ali Haji bahwasannya IFRS dan segala turunannya tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa dan Negara, hal ini dikarenakan kesombongannya untuk meniadakan Tuhan dalam bentukan regulasinya.

Kepentingan pribadi dan hawa nafsu yang ditanamkan paham liberal lambat laun akan menuai hasil bagi dirinya sendiri, telah tampak keruntuhan tahap demi tahap melalui krisis yang melanda negeri mereka, kasus demi kasus seolah tiada henti menyelimuti, ENRON dan sebagainya merupakan bukti nyata yang tak terbantahkan lagi. Raja Ali Haji berpendapat bahwa mereka yang dipengaruhi nafsu dan keserakahan akan memperoleh kerugian dan bencana. Gurindam 12 pada pasal kedua menyatakan:

Pasal kedua

Apabila terpelihara mata

sedikit cita-cita

Apabila terpelihara kuping

kabar yang jahat tidaklah damping

Bersungguh-sungguh memelihara tangan

dari pada segala berat dan ringan

Apabila perut terlalu penuh

keluarlah fi'il yang tidak senonoh.

Mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan kekuatan iman dan taqwa akan berhasil menjalankan hidupnya baik didunia maupun di akhirat. Itulah makna kemenangan yang hakiki, berjihad melawan hawa nafsu. Seorang yang berhasil melawan syahwatnya akan senantiasa menjadikan Iman sebagai pondasi awal dalam bertindak dan bertutur seperti yang tercermin dalam pasal kelima Gurindam 12 berikut :

Pasal kelima

Jika hendak mengenal orang berbangsa,

lihat kepada budi dan bahasa;

Jika hendak mengenal orang yang mulia,

lihatlah kepada kelakuan dia;

Jika hendak mengenal orang yang berilmu,

bertanya dan belajar tiadalah jemu;

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Inilah yang sejatinya harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Dalam mengadopsi suatu aturan, harus dilihat dahulu jati diri bangsa Indonesia. Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Berkeyakinan bahwa Tuhan itu Esa dalam sila pertama harus menempatkan posisi ketuhanan di atas yang lainnya. Begitupun juga dengan standar dan aturan, semua aturan dan standar harus berdasarkan kepada Ketuhanan. Hal inilah yang membedakan kepribadian bangsa Indonesia dengan yang lain. Indonesia yang merupakan Negara beragama dan berbudaya tidak tepat untuk mengadopsi standar dan aturan yang bersifat sekular.

Dengan bersandar kepada Ketuhanan maka penegasian terhadap kekuatan di luar manusia (*the dischantment of nature*); penegasian atas kekuasaan lokal (*the desacralization of politics*) dan penegasian nilai-nilai non materi (*the deconsecration of values*) sebagaimana ciri khas sekularisme yang dinyatakan oleh Al-Attas (1980) dapat terbantahkan. Negara Indonesia yang berketuhanan tidak akan terlepas dari kekuatan di luar Manusia (Kekuatan Iman dan Doa), nilai-nilai lokal (kearifan lokal dan budaya) dan nilai-nilai non materi (mufakat, gotong royong dan musyawarah).

SIMPULAN

Tulisan dalam artikel ini masih terbatas pada pemikiran apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengadopsi IFRS sudah sesuai dengan kepribadian bangsa dilihat dari sudut pandang budaya melayu. Hasil menunjukkan bahwa pengadopsian standar secara paripurna bertentangan dengan khasanah kearifan lokal budaya melayu. Untuk itu, masih banyak sekali ruang interpretasi berbeda yang dapat dieksplorasi untuk penelitian selanjutnya. Inilah bentuk ikhtiar penulis dalam mengangkat khasanah kearifan lokal. Jika bukan kita yang mencoba dan memulai, lalu siapa lagi, apakah nanti kedepan kearifan lokal kita juga akan dijajah oleh Negara lain dan di klaim oleh mereka sebagai kekayaan intelektual mereka. *Wallau'alam bishawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. (2013). A template for integrated reporting. *Journal of Intellectual Capital*. <https://doi.org/10.1108/14691931311323869>
- al-Attas, S. M. N. (2005). Islamic Philosophy: An Introduction. *Journal of Islamic Philosophy*.
<https://doi.org/10.5840/islamicphil2005113>
- Al-Attas, S. M. N. (1980). The Concept of Islamic Education. *The Keynote Address Delivered at the First World Conference on Muslim Education*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Andaya, B. W., & Matheson, V. (1983). *Pikir Islam dan Tradisi Melayu* (D. Marr, ed.). Jakarta: Grafiti Press.
- Bleidorn, W., Arslan, R. C., Denissen, J. J. A., Rentfrow, P. J., Gebauer, J. E., Potter, J., & Gosling, S. D. (2015). Age and Gender Differences in Self-Esteem-A Cross-Cultural Window. *Journal of Personality and Social Psychology*, 111(3), 396–410.
<https://doi.org/10.1037/pspp0000078>
- Briando, B., & Embi, M. A. (2019). Pandangan Hidup dan Alam Pikiran Orang Melayu. *Jurnal Oetoesan Hindia*, 1(2), 69–78.
- Djamhuri, A. (2014). *Akuntansi Perspektif Kritis: Suatu Pengantar*. ARTS V, 1–11.
- Efferin, S., & Rudiawarni, F. A. (2014). Memahami Perilaku Stakeholders Indonesia Dalam Adopsi IFRS: Tinjauan Aspek Kepentingan, Bahasa, Dan Budaya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 138–164.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2014.08>
- Farazmand, A. (2009). Building administrative capacity for the age of rapid globalization: A modest prescription for the twenty-first century. *Public Administration Review*.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.02054.x>
- Farazmand, A. (2010). Bureaucracy and Democracy: A Theoretical Analysis. *Public Organization Review*.
<https://doi.org/10.1007/s11115-010-0137-0>
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*.
<https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Hamidah, Triyuwono, I., Sukoharsono, E. G., & Djamhuri, A. (2015). The Hegemony of International Interests on IFRS Adoption in Indonesia: An Accounting Ecology Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.016>
- Hofman, B., Kadjatmiko, Kaiser, K., & Sjahrir, B. S. (2006). Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia. In *World Bank Policy Research Working Paper* (Vol. 3911).
- Hyndman, N., & Connolly, C. (2011). Accruals accounting in the public sector: A road not always taken. *Management Accounting Research*, 22(1), 36–45.
<https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.10.008>
- Kamayanti, A. (2011). Akuntansiasi Atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(3), 531–540.

- Lu, Y., & Abeysekera, I. (2014). Stakeholders' power, corporate characteristics, and social and environmental disclosure: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.005>
- Mantzari, E., & Georgiou, O. (2019). Ideological hegemony and consent to IFRS: Insights from practitioners in Greece. *Critical Perspectives on Accounting*.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.06.003>
- Moberg, D. O. (2010). *Spirituality Research : Measuring the Immeasurable ?* 62(2), 99–144.
- Mulawarman. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 155–171.
- Mulawarman, A. D. (2009a). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E-Publishing Company.
- Mulawarman, A. D. (2009b). Perubahan Melalui Akuntansi Syariah di Era Neoliberalisme. *Seminar Di STEI TAZKIA*.
- Mulawarman, A. D. (2016). *2024 Hijrah Untuk Negeri*. Malang: Yayasan Rumah Peneleh.
- Mulawarman, A. D. (2019). Jang Oetama yang Hidup. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1(1), 33–42.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1996). *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Osborne, S. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 337–387.
<https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Sarker, S., & Sarker, S. (2009). Exploring agility in distributed information systems development teams: An interpretive study in an offshoring context. *Information Systems Research*, 20(3), 440–461. <https://doi.org/10.1287/isre.1090.0241>
- Suwardi, M. (1991). *Adat Melayu*. Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI.
- Tresnawati, E. F., & Setiawan, A. R. (2013). Ada Apa Dengan SAP (AADS) Akrua? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 198–215.
- Triuwono, I. (2016). Taqwa : Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human ' s Divine Consciousness. *PERTANIKA*, 24(7), 89–104.
- Watts, R., & Zimmerman, J. (2006). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *Accounting Review*.
- Yusdita, E. E. (2019). Rencana Pembelajaran (untuk) Peradaban. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1(1), 1–12.